PUBLICIAN
JOURNAL OF PUBLIC SERVICE, PUBLIC POLICE, AND ADMINISTRATION
Volume (3) No (1) Tahun 2024: 66-72 │Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Available online at https://journal.unibos.ac.id/jp
e-ISSN: 2829-7695│ p-ISSN: 2829-8330│DOI: 10.56326/jp.v3i1.2377

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

Implementation of the Program Keluarga Harapan in North Banggai District, Banggai Laut Regency

Muskira Su'udin*, Juharni, Natsir Tompo
Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
*email: muskira2112@gmail.com

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui : 30 Januari 2024

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dana memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksan dan mekanisme Program Keluarga Harapan di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana program keluarga harapan di kecamatan banggai utara kabupaten banggai laut belum berhasil secara umum dari empat (4) indikator hanya komunikasi, disposis , stuktur birokrasi yang berjalan dengan efektif dan efesien sedangakan SDM belum sepenuhnya terpenuhi. Dan untuk proses mekanisme yang masih memakai beberapa aturan-aturan yang belum dirubah masih berpatoakn di peraturan PKH yang dulu. saran proses pemutakhiran data harus di tingkatkan lagi. Program kelurga harapan pada RTSM/KSM agar tidak ada lagi ketergantunagn terhadapa bantuan-bantuan lainnyadan dapat mengunakan bantuan dengan semestinya dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberiakan pemerinta dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Banggai Utara

Abstract

Family Hope Program (PKH) is assistance that helps poor families have access to funds to utilize basic social services such as health, education, food and nutrition, care and assistance. This research aims to determine the implementation and mechanisms of the PKH in North Banggai District, Banggai Laut Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research indicate that the implementation of the PKH in the North Pride sub-district, Banggai Laut Regency has not been successful in general from the four (4) indicators, namely communication, disposition, bureaucratic structure which runs effectively and efficiently, while human resources have not been fully met. And for the mechanism process that still uses several rules that have not been changed, it is still based on the previous PKH regulations. suggestions that the data updating process should be improved further. Hope family program in RTSM/KSM so that there is no longer any dependence on other assistance and can use assistance properly and be able to take advantage of assistance provided by the government in the long term.

Keywords: *Implementation, Family Hope Program, North Banggai*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di sebagian banyak negara berkembang lainya salah satu permasalahan yang terdapat pada setiap negara berkembangan itu adalah di bidang sosial ekonomi khususnya masalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi masalah global sejak zaman kemerdekaan bangsa Indonesia dan masalah ini masih tetap menjadi masalah utama bagi bangsa Indonesia saat ini. Hal ini

ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menghadapi perkembangan zaman diera globalisasi ini. Dengan adanya kemiskinan dapat mempengaruhi banyak hal dari tujuan dan cita-cita nasional maupun internasional yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Kemiskinan adalah keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, kemiskinan juga masalah global. Beberapa memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, yang lain melihatnya dari sudut pandang etis dan evaluatif, yang lain memahaminya dari sudut pandang ilmiah yang mapan, dan seterusnya. Kemiskinan juga dapat menghambat perkembangan suatu Negara sehingga kemiskinan merupakan masalah penting yang perlu diperhitungkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan banyaknya program bantuan untuk masyarakat yang menangani masalah kemiskinan di negara ini yang pada akhirnya diarahkan pada bentuk peningkatan kesejahteraan dan pengurangan penduduk miskin.

Salah satu perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin itu . PKH adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin, program ini dilaksanakan oleh kementerian sosial untuk membantu mengatasi kemiskinan, tujuan utama PKH untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. Pemerintah telah meluncurkan program pengentasan kemiskinan Salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu PKH, keluarga harapan adalah program Kementerian Sosial dengan cakupan nasional sebagai upaya menangani kemiskinan di Indonesia program ini sudah berjalan sejak tahun 2007. Pemerintah Indonesia ingin mengatasi kemiskinan secepat mungkin dengan program PKH, bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin. (Kementerian Sosial, PKH) komponen PKH terdiri dari pendidikan dan kesehatan bagi keluarga. PKH ini adalah program bantuan tunai untuk keluarga yang sangat miskin (RTSM) dan persyaratan Kondisi yang telah pemerintah tetapkan, dengan program uang tunai bersyarat Konversi (CCT) atau perangkat lunak aplikasi Kritik bersyarat.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.Dengan adanya PKH keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan akan mendapatkan bantuan dana di periode tertentu. PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dana memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendamping.

Diindikasikan bahwa permasalahan pelaksanaan PKH di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi oleh dinas pelaksana PKH, lambatnya penyaluran dana PKH antar peserta, dana yang diberikan oleh penyelenggara PKH tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak, terdapat kesalahan penggunaan RSTM untuk hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program PKH. Selain itu juga ada permasalahan yang sangat umum yaitu pendataan RSTM tidak tepat sasaran sebagai penerima PKH dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta kualitas peserta PKH tidak meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan ibu nifas, lima tahun (balita) dan anak-anak prasekolah anggota RSTM. Ini diakibatkan oleh Kurang adanya pengawasan langsung atau monitoring langsung terhadap peserta penerima program

keluarga harapan, sehingga tidak mengetahui mengapa peserta belum memahami dengan baik apa yang menjadi fungsi dan tujuan dalam Pelaksana Keluarga Harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksan dan mekanisme Program Keluarga Harapan di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Dengan waktu penelitian Maret- Agustus 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian explorasi yang mana peniliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggalih informasi lebuh lanjut. dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan metode observasi serta wawancara langsung di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, kerena kejadian yang dijelaskan berasal dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan. (dalam hal ini pengembangan objek wisata oleh lembaga terkait, yakni Dinas Pariwisata dan Olahraga) yang secara fundamental tergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2005), pada hakikatnya deskriptif kualitatif ialah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata- kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. Sugiyono (2012) menyebutkan terdapat empat jenis teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu penggabungan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

Moleng (2004) bahwa informan penelitian yaitu seorang yang ditugaskan untuk memberi informasi mengenai keadaan dan kondisi penelitian lainnya. Informan yang dalam hal ini yaitu sejumlah pihak yang bisa memberi informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan mekanisme dalam Program Keuraga Harapan (PKH). Adapun informan dari penelitiaan ini adalah masyarakat Penerima PKH Kecamatan Banggai Utara, koordinator PKH, Pemerintah Kecamatan Banggai Utara dan pendampingan PKH Kecamatan Banggai Utara.

Dalam penilitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data Tringulasi waktu. yang mana Teknik ini di lakukan dengan cara wawancara, observasi, atau Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda yang berbeda, maka dari itu, bila hasil uji mengahasilkan data yang berbeda maka di lakukan secara berulang-ulang sehingga di temukan kepastian datannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Banggai Utara adalah Kecamatan Hasil Pemekaran Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Banggai. Kecamatan Banggai Utara diresmikan pada tanggal 21 desember 2006 sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Tinangkung Selatan dan Kecamatan Bangkurung. Kecamatan Banggai Utara Letak Geografisnya pada titik Koordinat antara 123,08º dan 123,11º Bujur Timur dan antara 140º dan 146º Lintang Selatan, Kecamatan Banggai Utara mempunyai Luas wilayah 58,05 Km² dengan jumlah penduduk 7.217 Jiwa (BPS, Banggai Laut, 2022). Secara topografi kecamatan Banggai Utara termasuk dalam kategori daerah dataran renda dengan ketinggian wilayah diatas permukaan laut (DPL) 145 M dari permukaan laut. Secara geologi kecamatan patimpeng memiliki 53 tanah berupa tanah keras, gambut, dan tanah persawahan. Potensi sumber

daya air yang dimiliki cukup besar Karena banyaknya sungai yang mengalir dalam wilayah kecamatan banggai utara . Secara iklim mempunyai katagori daerah sub tropis yang terdiri dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

1. Program Keluarga Harpan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan diseluruh wilayan Republik Indonesia pada tahun 2013, termasuk di kecamatan banggai utara kabupaten banggai laut , pada tahun 2015 di kecamatan banggai utara kabupaten banggai laut. Adapun tugas pokok kanto kecamatan banggai utara adalah membangun dan memajukan kehidupan masyarakat yang ada di kecamatan Banggai Utara kabupaten Banggai Laut.

Jumlah KPM yang terdapat di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2022 yaitu 275 keluarga . Dalam pelaksan program keluarga harapan PKH di kecamatan banggai utara, terdapat seorang personel dari unit pelaksan program keluarga harapan (UPPKH) yaitu pendamping pkh. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas pokok ini membantu dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Adapun kategori yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimana disesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks dan faktor penerima bantuan sosial pada tahun 2021 yaitu Ibu hamil, anak usia dini 0 s.d 6 tahun, pendidikan anak SD / sederajat, pendidikan anak SMP /sederajat, pendidikan anak SMA / sederajat, penyandan disabilitas berat (tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bnatuan orang lain), usia lanjut minimal usia 70 tahun ke atas.

Alur pelaksanaan PKH, mulai dari pengumpulan data para target program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan para penerima manfaat dan melakukan validasi, selanjutnya pemenuhan syarat-syarat untuk menjadi penerima manfaat, setelah memenuhi semua syarat dan sudah menjadi penerima manfaat selanjutnya para penerima manfaat mendapatkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping berupa pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dan mendapatkan layanan serta verifikasi yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, setelah mendapatkan layanan para penerima manfaat harus memiliki komitmen dengan ketentuan yang sudah ada untuk para penerima manfaat dan akan mendapatkan sanksi jika para penerima manfaat melanggar ketentuan yang sudah ada, dan yang terakhir pemutakhiran data apakah ada perubahan data melalui laporan para penerima manfaat.

2. Implementasi Program Keluarga Harpan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggnakan hasil observasi wawancara dan dokumentasi dengan informan-informan terpili yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaaan penelitian sesuai degan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Program Kelurga Harapan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Berikut analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini.

a) Komunikasi

Dalam Teori Edward III tentang komunikasi (communication) Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementers). Berdasar hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menarik

kesimpulan bahwa komunikasi dalam pelaksana program kelurga harapan di kecamatan banggai utara itu sudah berjalan dengan efektif dan efesien seseuai dengan teori implementasi dari Edward III tentang komunikasi.

b) Sumber Daya

Dalam teori Edward III tentang sumberdaya Sumber daya (Resources) Sumber daya yang disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sumberdaya dalam pelaksana program keluarga harapan itu belum berjalan denga efektif dan efesian seperti teori dari Edward III tentang sumberdaya

c) Disposisi

Dalam teori Edward III tentang Disposisi kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa disposisi dalam pelaksdan program keluarga harapan sudah berjalan dengan efektif dan efesien dengan teori imlementasi dari Edward III tentang disposisi

d) Stuktur Birokrasi

Struktur Birokrasi (bureaucratic structure) Struktur birokrasi ini mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang bersangkutan dan hubungan antara organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan dengan informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa stuktur birokrasi dalam pelaksa program keluarga harapan sudah berjalan dengan efektif dan efesien sesuai dengan teori implementasi dari Edward III tentang stuktur birokrasi .

e) Pemilihan Daerah Dan Pemilihan Peserta PKH

Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan ditingkat pelaksana oprasional atau proses pertama dalam program kelurga harapan yaitu salah satunya adalah seleksi dan penetapan lokasi. Berdasarkan opservasi dan wawancara dengan informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mekanisme dalam program keluarga harapan sudah berjalan dengan efektif dan efesien sesuai dengan teori mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diatur dalam Undang-undang Dasar NO. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial.

f) Pertemuan awal dan validiasi calon peserta

Setelah proses penetapan lokasi dan seleksi calon penerima selanjutnya yaitu pertemuan awal peserta calon penerima dengan pendamping PKH. Berdasarkan observasi dan wawancara dari informan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa mekanisme dalam program keluarga sudah efektif dan efesien sesuai dengan teori mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diatur dalam Undang-undang Dasar NO. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial.

g) Pembentukan kelompok peserta PKH

Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta PKH. Setiap 15-25 RTSM/KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH kabupaten/kota dan kecamatan untuk setiap kegiatan, seperti kegiatan

sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS), dan sebagainya. Berdasarkan observasi wawancara dengan informan tentang mekanisme program keluarga harapan itu berjalan dengan efektif dan efesien sesuai denga teori mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diatur dalam Undang-undang Dasar NO. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial.

h) Verifikasi Komitmen.

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. kesehatan pada awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan berikutnya dengan membawa kartu peserta PKH.Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada semua peserta PKH untuk memantau kehadiran/pemeriksaan pada layanan Kesehatan. Berdasarkan wawncara dengan bebrapa pihak yang bersyangkutan dengan program keluarga harapan untuk verifikasi komitmen itu sudah berjaln dengan efektip dan efesien sesuai dengan teori teori mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diatur dalam Undang-undang Dasar NO. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial.

i) Proses pemutakhiran data penanguhan dan pembatalan.

Proses pemutakhiran data yaitu apabila ada perubahan data dari RTSM yang tidak sesuai dengan data awal yang tercatat pada master data base yang bersifat dinamis. Perubahan data ini bisa terjadi sebagai hasil kegiatan pendamping yang dilaksanakan oleh pihak PKH. berdasarkan wawncra dengan beberapa sumber seperti yang telah tertera dibab 4 bahawa proses pemutakhiran dan penaguhan serta pembatalan itu berjalan dengna efektip dan efesien.sesuai dengan teori teori mekanisme pelaksanaan PKH berlandaskan aturan hukum pelaksanaan PKH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dan diatur dalam Undang-undang Dasar NO. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahtraan sosial.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap semua kalangan yang mebutuhkan komunikasi, sumber daya serta struktur birokrasi PKH. Factor pendorong dan mekanisme program keluarga harapan saling berkaitan dengan faktor pelaksanan dalam kesuksesan program keluarga harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Badan Pusat Statistik.2022.Sensus Penduduk. http://bps.go.id (Diakses pada tanggal 10 mei 2022)

Hasmini, Andi Rasyid Pananrangi, Syamsuddin Maldun 2021. Kebijakan Pemerintah & Program Keluarga Harapan, Gowa – Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida

Nugroho, Riant D. 2004. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Alex Media

Prisca Lucya, Prisca Lucya. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.

Purwanto, Slamet Agus, Sumartono Sumartono, and Muhammad Makmur. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)." Wacana Journal of Social and Humanity Studies 16.2 (2013)

Saprudin.I, Juharni, Nurkaidah 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampaan, Gowa –

Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta.

Sumardi, Mulyono dan Hans – Dieter Evers. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali

Tlonaen, Yudid BS, Willy Tri Hardiyanto, and Carmia Diahloka. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3.1 (2015).

Virgoreta, Dyah Ayu. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur). Diss. Universitas Brawijaya, 2014.

Yulianthi, Juharni, Nurkaidah 2022. Kebijakan Stabilitas Harga Pangan Studi Pasar Tradisional Sentral Pangkep, Gowa – Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida.